

MEMBANGUN IDENTITAS ETNIS ORANG TIMOR; INTEGRASI ATAU SEPARASI?

Yanuaris Koli Bau

Universitas Nusa Cendana Kupang-Indonesia

Abstrak

Kesukubangsaan merupakan kecenderungan yang ada di mana saja, dan akan menguat apabila ada kepentingan politik praktis dari orang-orangnya. Ada banyak cara bagaimana satu kelompok etnis membangun identitas kelompoknya. Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah di Indonesia, sebagian besar orang lebih bersemangat membangun identitas kelompok etnisnya dan dijadikannya sebagai filter handal dalam kehidupan politik. Berbagai kasus dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pengisian lowongan jabatan publik, dan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan sebagian dari ekspresi etnisitas dimaksud.

Seperti halnya di daerah lain, data lapangan yang dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) dan pengamatan langsung (direct observation) membuktikan bahwa persoalan kesukubangsaan di NTT selalu mewarnai kehidupan sosial politik sebab setiap kelompok etnis baik yang berasal dari NTT maupun yang berasal dari luar NTT selalu mempertahankan identitas etnisnya. Beberapa cara yang dipergunakan untuk mempertahankan identitas etnisnya antara lain melalui pemberian nama kepada: anak, usaha, jalan bahkan perkampungan tempat mereka tinggal, kegiatan arisan, pembangunan perkampungan berbasis etnis dan diberi nama menurut kelompok etnis penghuninya dan sebagainya. Selanjutnya kesukubangsaan yang menguat dengan cara-cara demikian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam kehidupan sosial dan politik.

Akhirnya berdasarkan data lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya membangun identitas kelompok etnis oleh berbagai kelompok etnis yang ada di NTT dapat menimbulkan separasi di tingkat lokal atau setidaknya menciptakan jarak sosial yang lebih renggang di antara berbagai kelompok etnis, dan dalam hal tertentu dapat mempengaruhi integrasi walaupun belum dapat dikatakan separasi.

Pendahuluan

Masyarakat tidak saja berbeda karena lingkungan geografisnya tetapi lebih dari itu berbeda karena faktor bawaan, yaitu kesukubangsaan. Orang dapat mengatakan bahwa seseorang mantan penduduk wilayah tertentu, tetapi orang tidak dapat mengatakan seseorang mantan etnis tertentu. Kesukubangsaan merupakan identitas, atribut yang dibawa lahir dan sekaligus dibawa mati.

Meskipun etnisitas merupakan identitas yang dibawa lahir dan sekaligus dibawa mati, sesungguhnya etnisitas merupakan konsep politik (Epstein, dalam Glazer and Moynihan, 1975; Koli Bau, 1999) sebab konsep ini membawa implikasi pada pembagian



sumberdaya (*resources*) dan sistem serta mekanisme reproduksi kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari etnisitas tampak jelas dari perilaku politik para elite ketika mereka mengambil keputusan untuk membagi sumberdaya yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik sumberdaya ekonomi, sumberdaya manusia maupun sumberdaya politik/kekuasaan. Bias pada kepentingan etnis umumnya tampak jelas, tetapi hampir tidak pernah dapat dibuktikan sebab para elite mempunyai banyak dalih untuk membenarkan perbutannya dan menolak adanya bias etnis dalam keputusan yang dibuatnya.

Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari 566 buah pulau besar dan kecil dengan keanekaragaman fisik dan sosiokultural yang sangat tinggi. Walaupun belum semua pulau-pulau itu dihuni sebab hanya 24 di antaranya yang dihuni, tetapi jumlah kelompok etnis yang mendiami wilayah ini cukup banyak. Data lapangan yang ada menunjukkan setidaknya terdapat 76 kelompok etnis/sub etnis di wilayah ini. Dalam kehidupan bersamanya, setiap kelompok etnis di wilayah ini berupaya mempertahankan identitas etnisnya dengan berbagai cara. Mengelompoknya anggota kelompok etnis tertentu pada wilayah atau kawasan perkotaan misalnya, merupakan salah satu cara bagaimana mereka menjaga identitas kelompoknya, demikian juga pemberian nama permukiman, jalan dan fasilitas umum menurut nama-nama yang mencirikan kelompok etnis tertentu yang sudah menjadi hal biasa di NTT, terutama di Kota Kupang sebagai ibu kota propinsi.

Seperti yang dikatakan oleh banyak peneliti (Jellinek, 1976; 1978; Manning and Effendi, 1991; Mantra, 1993) para migran yang datang dari perdesaan ke perkotaan cenderung bermukim secara mengelompok menurut etnis dan asal daerah. Di tempat permukiman baru di perkotaan itu mereka tetap menjaga hubungan sosial dan tradisi kesukubangsaan dan daerah asalnya, menjaga identitas etnisnya dengan baik. Teori-teori migrasi dan teori Sosiologi Perkotaan yang dikemukakan oleh banyak peneliti dan penulis (Titus, 1988; Todaro, 1992; Toby, 1964; Roberts, 1978; Connell, 1990; Quinn, 1955; Koli Bau, 1996; 1997; 1999) pada dasarnya membenarkan adanya pola permukiman mengelompok menurut asal daerah dan kesukubangsaan dengan berbagai alasan seperti: saling menolong, melindungi diri dari lawan, serta mempertahankan identitas kelompoknya.

Berbagai kelompok etnis yang menghuni Pulau Timor juga mempunyai kecenderungan yang sama dengan apa yang ditemukan para peneliti dan penulis di atas. Kehadiran mereka di pulau



Timor pada masa silam juga sebagai migran yang datang dari daerah lain sebagaimana yang dituturkan dalam tutur adat (Parera, 1971; Berthe, 1972; Bere Tallo, 1971; Seran, 1996) dan oleh karena itu mereka bermukim secara mengelompok di daerah perbukitan. Besar kemungkinan pemilihan tempat perbukitan dimaksud untuk melindungi diri dari kelompok etnis lain dan untuk menguasai sumberdaya alam yang pada umumnya terdapat di hutan-hutan di daerah perbukitan.

Walaupun kelompok-kelompok etnis yang mendiami pulau Timor (baik di bagian timur maupun bagian barat) cenderung bermukim di daerah perbukitan sehingga patut diduga adanya konflik dan peperangan di antara mereka pada masa silam, tetapi mereka mengaku berasal dari satu keturunan yang menyebar ke berbagai daerah dalam kurun waktu yang sangat lama (Parera, 1971; Berthe, 1972; Bere Tallo, 1971; Seran 1996). Besar kemungkinan apa yang dikatakan dalam tutur adat dan hasil penelitian beberapa orang itu benar sebab dari aspek fisik/ragawi, bahasa dan tradisi kelompok-kelompok etnis yang mendiami pulau Timor tampak terdapat banyak keasamaan. Dengan dasar kesamaan itulah mereka mencoba membangun identitas bersama sebagai Orang Timor melalui beberapa cara, dari cara membangun jaringan sosial tradisional berdasarkan ikatan genealogis (seperti *malu-ai*, *hulo lep* untuk etnis Bunak, *fetsawa-uma mane*, *moruk no metan* untuk etnis Tetun), aliansi tradisional untuk kepentingan ekonomi dan politik (seperti Belu Mau, Sabu Mau, Ti Mau di kalangan orang Belu, Sabu dan Rote Ti) sampai mendirikan organisasi modern dengan tujuan membangun kembali kebersamaan dan persaudaraan di antara mereka seperti **Persehatian Orang Timor (POT)** pada tahun 2003, meskipun sering sulit dibedakan antara membangun persaudaraan berdasarkan ikatan budaya dan membangun basis kekuatan politik untuk memperebutkan sumberdaya ekonomi dan politik serta melakukan reproduksi sumberdaya ekonomi, sumberdaya manusia dan sumberdaya politik.

Identitas Umum Orang Timor

Orang Timor adalah nama umum yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari untuk menyebutkan kelompok etnis Bunak, Dawan (Meto), Helong, Kemak dan Tetun, serta Melus di wilayah Kabupaten Belu (yang sudah punah) yang mendiami pulau Timor. Keenam kelompok etnis ini diyakini oleh sebagian besar orang sebagai penduduk asli pulau Timor (barat) atau setidaknya-tidaknya yang lebih dulu mendiami pulau ini. Secara sadar atau tidak, penggolongan ini telah menimbulkan jarak sosial tertentu di antara kelompok yang



diidentifikasi sebagai Orang Timor dengan kelompok lain yang bukan Orang Timor. Dalam pergaulan sehari-hari, tampak relasi sosial berjalan biasa, akan tetapi dalam hal tertentu seperti pemilihan pimpinan organisasi atau pengisian lowongan atau jabatan publik klasifikasi ini dimunculkan sehingga tidak jarang terjadi antagomisme dan konflik kepentingan. Ungkapan, stereotipe, bahkan stigma tertentu yang dikenakan pada kelompok etnis tertentu biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperebutkan kekuasaan, kesempatan atau sumberdaya ekonomi. Sebagai contoh misalnya, dalam satu kegiatan penggantian pimpinan organisasi kepemudaan, seseorang yang bukan dari Timor mengatakan “jangan pilih si A, Dia orang Timor bodoh”, tokoh lain lagi mengatakan “Timor (maksudnya orang Timor) *ko’u* (artinya tolol), jangan dipilih”; sebaliknya tokoh yang berasal dari Timor mengatakan “jangan pilih si A, Dia primordialis”, tokoh lainnya dari Timor mengatakan “Orang Flores rakus, tidak tahu diri, Orang Rote itu ‘rombongan *teku*’ (perampok), dan sebagainya. Tidak ada satupun kelompok etnis yang tidak mendapat cercaan atau fitnahan dalam perebutan sumberdaya ekonomi dan kekuasaan.

Dalam suasana kehidupan bersama demikian, setiap kelompok etnis cenderung berupaya menjaga identitas kelompoknya tidak saja melalui cara-cara seperti disebutkan di atas, tetapi juga dengan cara mendirikan kelompok-kelompok yang relatif tertutup dan permanen seperti organisasi kesukuan dan kedaerahan yang keanggotaannya terbatas pada orang-orang sesuku dan sedaerah, kelompok arisan yang juga didasarkan pada kesamaan suku dan daerah, bahkan membangun kompleks permukiman yang penghuninya orang satu etnis dan sedaerah. Pengelompokan sosial yang unik ini dengan sendirinya menimbulkan persaan sebagai ‘orang dalam’ (*in-group feeling*) yang kuat berhadapan dengan yang bukan ‘orang dalam’ (*out-group*). Selanjutnya kelompok sedaerah yang terdapat diberbagai kota/tempat akan membangun jaringan sosial yang memudahkan para anggotanya akses pada sumberdaya ekonomi dan kekuasaan (Koli Bau, 1996; 1997; 1999). Melalui jaringan sosial inilah reproduksi ekonomi dan politik dilakukan secara gigih dan rapih untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Adanya migrasi berantai seperti yang ditemukan dalam berbagai penelitian (Titus, 1988; Todaro, 1992; Ramli, 1990; Lee, 1992; Jellinek, 1976, 1978; Bott, 1971; Breman, 1975; Connell, 1990; Goldscheider, 1989) secara langsung atau tidak langsung telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam upaya membangun dan memelihara identitas kelompok etnis.



Pemudaran dan Pembangunan Kembali Identitas Orang Timor

Orang Timor dalam artian sosiologis sebenarnya sulit ditemukan sebab mereka yang menghuni pulau Timor terdiri dari beberapa kelompok etnis dengan kebudayaannya sendiri. Pengertian orang Timor lebih merupakan satu atribut umum kepada kelompok-kelompok etnis dengan kebudayaannya sendiri-sendiri yang hidup bersama membentuk kelompok sosial dan mendiami pulau Timor dalam waktu cukup lama dan dianggap sebagai penghuni asli atau penghuni awal pulau Timor. . Keterlibatan dalam organisasi sosial kemasyarakatan, kelembagaan pemerintahan dan keagamaan, kelembagaan sosial lainnya bahkan dalam persilangan perkawinan tidak melunturkan keterikatan dalam setiap kelompok sosial.

Kehadiran penjajah Portugis dan Belanda di pulau Timor tidak menghapuskan identitas masing-masing kelompok etnis, sebaliknya cenderung mempertajam identitas setiap kelompok etnis yang ada dengan maksud agar lebih mudah untuk diperhadapkan satu dengan yang lainnya. Kebijakan penjajah Belanda menempatkan migran dari Rote, Sabu dan Solor pada busur luar kota Kupang membentuk setengah lingkaran dengan pusatnya di benteng serdadu penjajah Belanda merupakan salah satu buktinya. Dalam catatan Parera (1971) dan Memori Gubernur NTT (1988) dikatakan bahwa pemerintah penjajah Belanda sengaja mendatangkan para '*begal*' dari Rote, Sabu dan Solor dan menempatkannya mengelilingi benteng pertahanannya dengan tujuan untuk memperhadapkan mereka dengan pasukan lokal yang datang dari Camplong dan Amarasi. Menurut catatan sejumlah saksi sejarah (Nifu, Doko, Amalo) dalam peperangan di Penfui antara *Topass* (keturunan Portugis-Timor) melawan tentara Belanda misalnya, penjajah Belanda lebih banyak mengerahkan para migran yang didatangkan dari Rote, Sabu dan Solor dan tidak menurunkan pasukannya (serdadu Belanda) sendiri. Demikian juga dalam konflik-konflik lainnya yang terjadi baik di sekitar Kupang maupun di wilayah lain di pulau Timor.

Taktik penjajah Belanda seperti di atas telah menumbuhkan rasa antipati bahkan permusuhan di antara berbagai kelompok etnis yang ada di pulau Timor. Menurut salah satu informan, mereka menyaksikan sendiri bagaimana serdadu Belanda mengadu para jagoan tiap kelompok etnis setiap harinya di areal pasar dengan memberikan imbalan uang seadanya. Mereka diharuskan bertarung sampai mati atau setidaknya-tidaknya sampai salah satu dari mereka cacat dan mengaku kalah. Apabila salah satu pihak kalah, serdadu Belanda menjadikan kekalahan



tersebut sebagai alasan mengolok dan menyebarkan fitnah untuk meneruskan mengadu jagoan setiap etnis pada kesempatan lain.

Menghadapi kenyataan demikian lambat laun muncul kesadaran dari warga setiap etnis untuk memperkuat ikatan kesukuan mereka baik untuk menghadapi serdadu Belanda maupun menghadapi kelompok etnis lain. Upaya yang dilakukan adalah menyegarkan ikatan-ikatan kesukuan yang berbasis hubungan darah (ikatan genealogis) serta membangun aliansi sosial tradisional di antara beberapa kelompok etnis, seperti: Belu-Sabu-Rote (Ti). Dengan berkembangnya situasi di wilayah lain di nusantara yang berupaya melawan penjajahan Belanda, tampaknya aliansi-aliansi sosial tradisional yang ada mendapat pemaknaan baru, yakni sebagai gerakan melawan penjajahan. Aliansi ini menjadi bentuk integrasi (politik) lintas etnis yang jauh dari makna separasi atau konflik. Aliansi ini juga secara tidak langsung menghidupkan identitas kelompok etnis yang sudah pudar.

Secara umum dapat dikatakan bahwa identitas etnis dalam masa penjajahan Portugis dan Belanda menjadi melemah atau diperlemah dikarenakan oleh konflik antar etnis yang sengaja dirancang oleh penjajah Belanda dan Portugis untuk memecahbelah masyarakat. Taktik penjajah ini direspon dengan menguakan ikatan etnis ke dalam dan membangun jaringan antar etnis ke luar akan tetapi tampaknya belum mampu memperkokoh etnisitas seperti yang pernah ada sebelum kedatangan penjajah karena relasi antar etnis telah demikian rusak oleh politik adudomba yang dilancarkan oleh penjajah Belanda dan Portugis.

Organisasi Berbasis Etnis: Konflik, Separasi atau Integrasi?

Konflik dan integrasi merupakan satu rangkaian proses sosial yang wajar yang akan dialami oleh setiap masyarakat. Proses sosial akan menjadi masalah apabila ada upaya salah satu pihak yang terlibat dalam konflik berusaha menghancurkan atau meniadakan eksistensi pihak lain. Berbagai cara dapat ditempuh untuk memenangkan konflik, termasuk peperangan.

Ujung paling ekstrim dari konflik dalam rangka kehidupan kenegaraan adalah separasi yang biasanya diawali dari gerakan-gerakan sosial politik yang sering mengatasnamakan gerakan moral seperti: demokrasi, keadilan, kebenaran dan sebagainya. Gerakan-gerakan dimaksud terkadang mengambil bentuk yang tegas seperti Organisasi Pappua Merdeka (OPM), Gerakan



Aceh Merdeka, dan sejenisnya, tetapi dapat juga mengambil bentuk yang kabur, terselubung dalam kegiatan organisasi lain yang menampilkan diri sebagai organisasi yang berwatak nasionalis.

Sejarah pergerakan sosial membangun identitas Orang Timor tidak banyak ditulis, kecuali sebuah organisasi yang dinamakan *Timor Verbond* yang didirikan pada zaman penjajahan Belanda dengan maksud untuk membangun gerakan sosial politik menuju kemerdekaan. Sejauh yang terdapat dalam sejarah Nusa Tenggara Timur, tampaknya tidak ada keberlanjutan kegiatan tentang gerakan ini kecuali ikatan emosional dari sejumlah narasumber yang mengetahui keterlibatan orangtua mereka dalam gerakan tersebut. Menurut para narasumber yang orangtuanya pernah terkiat tersebut, gerakan *Timor Verbond* meliputi seluruh wilayah pulau Timor dan tidak dibatasi untuk kelompok sosial tertentu baik yang berafiliasi pada agama atau sukubangsa. Satu-satunya yang membatasi merek adalah batasan penjajah dan terjajah sebab gerakan ini bertujuan mengusir penjajah Belanda dari pulau Timor.

Sepanjang yang diketahui dari berbagi sumber, tidak ada lagi gerakan atau organisasi bersifat kedaerahan yang kuat yang dibentuk setelah kemerdekaan selain beberapa partai politik yang berbasis agama seperti Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia dengan komisariat atau cabang di beberapa daerah. Cabang-cabang dan komisariat tersebut meskipun beranggotakan orang sederhana dan terkadang terkesan memperjuangkan kepentingan politik parsial daerah dan etnis tertentu akan tetapi bukan merupakan organisasi yang berbasis etnis. Cabang atau komisariat lebih merupakan jembatan antara naggota dengan pengurus di tingkat atasnya.

Dalam bidang pemerintahan tercatat adanya Dewan Raja-Raja Timor atau *Timor Ellan Federatie* yang dibentuk pada tahun 1946 dengan ketuanya H.R Koroh dari Amarasi (Memori Gubernur NTT, 1978), tetapi pembentukan ini lebih dimaksud untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dewan Raja Timor ini bukanlah organisasi yang bertujuan membangun identitas etnis Orang Timor secara khusus. Masih bertahannya penguasa lokal (*raja, liurai, usif, tamukung, fetor*) hanya berfungsi memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan bukan untuk mempertahankan atau membangun identitas atau sentimen politik etnis.



Di awal tahun 2000 ada gejala yang cukup menarik setelah Propinsi Timor Timur memisahkan diri dari Republik Indonesia, yakni terbentuknya organisasi *Uni Timor Aswain (UNTAS)* atau Persatuan Pejuang Timor. Dari namanya terkesan seolah-olah ada organisasi perjuangan yang didirikan oleh orang Timor, tetapi pada kenyataannya organisasi ini tidak melibatkan orang Timor secara keseluruhan. Keanggotaan organisasi ini hanya terbatas pada tokoh pengungsi Timor Timur. Menurut mantan Sekjen UNTAS, organisasi ini kemudian bubar karena banyak orang mempertanyakan tujuannya sebab perjuangan politik untuk penyelesaian status pengungsi Timor Timur tampaknya lebih dominan. Nama “Uni Timor” dalam kenyataannya tidak mencerminkan kebersamaan orang Timor dan kepentingan orang Timor secara keseluruhan tetapi lebih bernuansa politis untuk memperoleh dukungan masyarakat Timor dan menarik perhatian Pemerintah Pusat dan masyarakat dunia mengenai persoalan pengungsi Timor Timur.

Dibubarkannya UNTAS tidak langsung mematikan gagasan para pejuangnya, sebab mereka kemudian mendirikan organisasi lain yang dinamakan **MAKASTI** yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat Timor termasuk eks pengungsi Timor Timur dengan keanggotaan meluas dan terbuka dengan melibatkan siapa saja yang mempunyai kesamaan tujuan. Selanjutnya, keterbukaan dan keinginan memperjuangkan kepentingan orang Timor ini juga mengalami nasib yang sama dengan UNTAS “mati enggan, hidup tidak” sebab banyak pihak mencurigai kepentingan politik praktis para pejuang Timor Timur sehingga tidak memberikannya dukungan secara penuh. Memang benar, ketika organisasi ini dideklarasikan sejumlah tokoh dan ilmuwan asal Timor barat dilibatkan dan diberi posisi dalam kepengurusan akan tetapi dukungan nyata tidak seperti yang diharapkan sehingga pada akhirnya mengalami kemacetan.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, dibentuk pula **Dewan Raja-Raja Timor** yang melibatkan sejumlah tokoh adat yang pernah berkedudukan sebagai “raja” pada zaman dulu baik yang berasal dari eks wilayah Timor Portugis maupun Timor (Timor Belanda). Awal pembentukan organisasi ini cukup baik karena dapat mengumpulkan dan mempertemukan banyak orang dengan semangat yang tinggi, mengadakan setidaknya dua kali pertemuan besar yang dinamakan **WITI BOT** (pertemuan akbar). Dalam waktu yang tidak terlalu lama muncul banyak pertanyaan bahkan kecurigaan mengenai eksistensi dan arah perjuangan organisasi ini. Sebagian orang menghubungkannya dengan kepentingan eks pejuang Timor Timur di Timor



Barat dalam rangka perjuangan merebut kembali bekas Propinsi Timor Timur yang sudah melepaskan diri dan menjadi *Republica Democratica Timor Leste (RDTL)*, sedang sebagian lainnya mencurigai kembalinya bentuk pemerintahan lokal yang lama yang berbau feodal dan kolonial. Kecurigaan yang pertama datang dari berbagai pihak yang secara khusus memperhatikan sepak terjang eks pejuang Timor Timur, yakni badan-badan dunia dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani pengungsi; mereka memandang terbentuknya organisasi ini akan mempersulit atau setidaknya menghambat penyelesaian pengungsi dan dapat membawa kekacauan dan ketidakpastian nasib negara baru RDTL. Kecurigaan kedua datang dari pemerintah dan politis serta kelompok kaum muda yang khawatir kembalinya “hegemoni kelompok tua” yaitu mereka yang pernah berkuasa sebelum kemerdekaan dan memerintah dengan cara yang dianggap feodal atau berbau kolonial. Pejabat pemerintah cukup beralasan untuk mencurigai dan khawatir sebab dengan semangat reformasi yang ada dan dengan bergulirnya gagasan otonomi daerah terbuka kemungkinan bagi tokoh-tokoh lama merebut kembali pengaruh politik dalam masyarakat. Apabila para tokoh tua merebut kembali pengaruh politik dalam masyarakat, pejabat pemerintah khawatir pengaruh dan kekuasaan mereka dapat terusik dan jabatan mereka dapat berakhir. Kecurigaan yang sama juga dialami oleh para politisi lokal, mereka khawatir apabila tokoh adat yang pernah memegang kekuasaan politik dan pemerintahan lokal dalam satu tangan bangkit kembali, besar kemungkinan jabatan sebagai pejabat politik (legislatif, pengurus partai) akan goyah, terlebih para tokoh yang tidak berakar dalam masyarakat karena dicalonkan dan atau dipilih oleh atasannya.

Untuk memperjuangkan tujuan bersama, kelompok Dewan Raja Timor pernah melaksanakan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali yang dinamakan *Witi Bot* (bisa dieja *biti bot*) dan melibatkan undangan secara meluas. Nama ini diambil dari bahasa Tetun, satu bahasa yang dipakai oleh sebagian orang yang menghuni pulau Timor bagian timur dan barat. Kata *witi bot* atau *biti bot* berarti pertemuan besar, musyawarah umum, muyawarah akbar. Setelah dua kali mengadakan pertemuan, kelompok ini juga akhirnya melemah dan tidak mampu meneruskan kegiatannya. Beberapa orang tokohnya mengatakan bahwa kelompok ini masih ada dan terus akan memperjuangkan tujuannya untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan, dan menggali kembali kekayaan budaya masyarakat di daratan Timor sebagai satu kesatuan sosial budaya walaupun banyak pihak mencurigai dan cenderung menolak kehadiran kelompok ini. Di pihak lain, beberapa orang yang berasal dari pulau Timor mempertanyakan kehadiran



sejumlah aktivis politik dan eks pejuang Timor Timur; mereka juga curiga dan khawatir kelompok ini akan memperjuangkan kepentingan politik terbatas dari para pejuang Timor Timur dan oleh karena itu cenderung ‘menunggu dan melihat’ dan belum akan memberikan dukungan nyata.

Tidak penuhnya dukungan ini dapat disebabkan oleh banyak alasan, antara lain siapa yang terlibat, apa yang diperjuangkan dan bagaimana memasyarakatkan gagasan kepada masyarakat akar rumput. Pada kenyatannya mempergunakan nama Timor tidak akan dengan sendirinya mampu menggalang dukungan masyarakat akar rumput sebab warga masyarakat sudah cerdas, mereka dapat membedakan dan menilai bahkan melakukan analisis. Timor dewasa ini sudah tidak lagi membawa implikasi etnisitas, melainkan lebih bernuansa geografis, administratif sebab tidak semua orang yang menghuni pulau Timor merupakan orang Timor yang memiliki latarbelakang ikatan genealogis karena dewasa ini hampir semua kelompok etnis yang ada di Indonesia hadir di Timor. Penggunaan nama “Daya Timor, Penjahit Timor, Pangkas Rambut Timor”, dan sebagainya bukan milik orang dari etnis Timor, tetapi milik orang dari etnis Bugis, Jawa, Madura dan sebagainya. Dihadapkan dengan kenyataan ini masyarakat akar rumput tidak mudah percaya pada nama “Timor”. Salah satu buktinya dalam kancah politik adalah gagalnya seorang pimpinan salah satu agama besar di NTT dan salah seorang ketua LSM ternama dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu lalu. Meskipun kedua orang ini sangat terkenal, memiliki jaringan nasional dan internasional, sangat berjasa bagi masyarakat tetapi mereka kalah dari seseorang yang tidak dikenal, tidak memiliki jaringan meluas, dan tidak berjasan besar bagi masyarakat tetapi masyarakat mengetahui pasti dari namanya bahwa yang bersangkutan orang asli Timor dari etnis Meto (Dawan) dan merintis serta menjadi ketua organisasi orang Timor pada tahun 2003. Sikap masyarakat ini dapat difahami sebab meski telah selama puluhan bahkan ratusan tahun berapa kelompok etnis telah bermigrasi ke Timor karena kebijakan penjajah Belanda dan keturunan mereka menyebut diri sebagai orang Timor akan tetapi secara kultural mereka tetap orang asli kampung leluhurnya karena mereka tetap menjaga identitas etnisnya dengan baik dan menjalin hubungan yang sangat erat dengan kampung asalnya serta meningkatkan intensitas migran berantai ke Kupang. Beberapa cara menjaga identitas kelomok antara lain: pemberian nama anak (*totem name*), pemberian nama kampung yang dihuni, nama jalan dan nama lembaga atau usaha yang dijalankan, pelaksanaan ritual tradisional dari kelahiran sampai kematian, dan sebagainya. Upaya menjaga identitas etnis ini juga secara sangat



tertutup dilakukan dalam rekrutmen tenaga kerja baik di sebagian sektor pemerintah maupun swasta dalam rangka reproduksi kekuasaan dan reproduksi sumberdaya ekonomi sebab kekuasaan dan kekuatan ekonomi merupakan dan faktor yang sangat menentukan eksistensi kelompok etnis.

Hampir bersamaan dengan perintisan Dewan Raja Timor, sejumlah orang juga merintis berdirinya Majelis Rakyat Timor yang pada prinsipnya ingin memperjuangkan kepentingan orang Timor. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, Majelis Rakyat Timor ini juga mengalami nasib seperti Dewan Raja Timor “hidup enggan mati tidak”. Penyebab ketidاكلancarannya disebabkan oleh hal-hal yang sama dengan yang menyebabkan kemacetan Dewan Raja Timor, yaitu tidak meluasnya dukungan masyarakat dan kurangnya sumberdaya ekonomi untuk melakukan kegiatan, bahkan sebagian orang mempertanyakan etnisitas para perintisnya karena sebagian besar mereka, bahkan semua penggagas awal bukan orang Timor. Sementara itu aparat keamanan juga mempertanyakan perjuangan Majelis Rakyat Timor karena dicurigai sebagai upaya melakukan gerakan separatisme mendirikan **Negara Timor Raya** (*Great Timor State*). Semua kendala ini pada akhirnya melemahkan semua gerakan yang membawa nama Timor tersebut dan mengatasnamakan kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan politik orang Timor.

Menjelang Pemilu tahun 2004 muncul lagi satu gerakan melalui organisasi yang dinamakan **Persehatian Orang Timor** (POT). Organisasi ini melibatkan sejumlah tokoh masyarakat di daratan Timor baik dari Timor Timur maupun Timor Barat dan bertujuan akan memperjuangkan kepentingan masyarakat Timor. Meskipun sudah didirikan menjelang pemilu, tetapi peresmiannya baru dilakukan hampir setahun kemudian oleh Gubernur NTT. Secara tampilan organisasi ini berbaju budaya bukan saja karena pada waktu peresmiannya para pengurus dan undangan berbusana tradisional dan setiap anggotanya diwajibkan memakai busana tradisional dalam setiap kegiatannya, tetapi karena tujuan organisasi ini, setidaknya yang dijanjikan oleh pengurusnya adalah memajukan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan terlebih memajukan kebudayaan orang Timor. Tampaknya janji pengurus ini masih harus dibuktikan dan untuk itu masih diperlukan waktu panjang, setidaknya sampai pemilu tahun 2008 yang akan datang untuk menguji apakah organisasi ini benar-benar memperjuangkan kepentingan sosial, ekonomi politik dan memajukan kebudayaan orang



Timor atau hanya merupakan gerakan politik terselubung dari orang tertentu dengan menggunakan nama Persehatian Orang Timor.

Mencermati POT sungguh menarik sebab dari Visi, Misi, semangat, pendekatan sifat dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangganya menjanjikan hal-hal positif yang tidak bersifat separasi tetapi sebaliknya bersifat menyatukan. Dalam visinya dikatakan “untuk membentuk manusia Timor menjadi asset yang sehat, cerdas, produktif untuk membangun kampung halamannya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Visi ini tampaknya sangat nasionalis, dan tidak banyak bedanya dengan visi organisasi lain yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Pada bagian misi, POT menetapkan 4 (empat) misi, yaitu mempersatukan semua potensi dan lembaga tradisional menjadi satu kesatuan persehatian orang Timor tanpa membedakan kepentingan kelompok agama, suku, asal daerah atau status sosial ekonomi; meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk menjadikan orang Timor produktif, cerdas dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik di tingkat nasional maupun global; meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia Timor sesuai kapasitas dan potensi setiap orang serta menyiapkan kesempatan kerja bagi generasi muda, serta untuk mengadakan kerjasama dengan organisasi lain.

Misi POT demikian memberi kesan seolah organisasi ini merasa terpanggil untuk menyetarakan Orang Timor dengan yang lainnya, padahal di daratan Timor sendiri terdapat begitu banyak kelompok etnis dengan potensi dan kemampuan atau kekuatan ekonomi yang sangat berbeda tetapi menamakan diri sebagai orang Timor. Dengan demikian misi POT tampak luhur dan ambisius tetapi karena warga masyarakat yang menghuni pulau Timor sangat majemuk maka kemungkinan besar akan sulit untuk mewujudkan misi tersebut.

Bila Anggaran Dasar POT pada pasal 14 (empat belas) menetapkan keanggotaan terdiri dari orang Timor asli, bukan orang Timor tetapi terkait kawin-mawin atau karena tinggal di Timor secara turun temurun, atau orang lain yang karena jasanya dapat menjadi anggota, maka organisasi ini di satu sisi terkesan terbuka dan nasionalis, tetapi pada saat yang sama dipertanyakan tentang “ketimorannya” karena keanggotaannya. Mungkinkah seseorang atau sekelompok orang yang tidak menghayati tatanilai dan tradisi yang sama dapat menjadi anggota satu persehatian yang berbasis budaya? Apalagi budaya orang Timor sendiri sangat majemuk dan hampir tidak ada satu kebudayaan satu etnis pun yang dapat mewakili semua



kelompok etnis yang ada di Timor. Pertanyaan atau keraguan seperti ini patut dikedepankan dalam satu proses akademis agar observer dapat memahami secara benar apa yang diobservasi. Berkenaan dengan itu motto yang ada pasal 6 Anggaran Dasar POT juga perlu dicermati. Motto itu ditulis dalam 3 (tiga) bahasa yaitu bahasa Tetun, Meto (Dawan) dan Helong, padahal daratan Timor dihuni oleh 5 (lima) kelompok etnis dengan 5 (lima) bahasa yang dianggap paling tua menghuni pulau ini, selain keempatbelas lainnya yang menghuni bagian timur pulau Timor. Bila bahasa yang dipergunakan hanya ketiga bahasa di atas maka ke manakah kesehatan orang Kemak dan orang Bunak serta yang lainnya yang berasal dari Timor Timur yang juga merupakan penghuni lama pulau ini, dan bagaimana dengan kelompok etnis lain yang menurut Anggaran Dasar dibolehkan menjadi anggota? Apakah kebudayaan mereka (bahasa dan tradisi) diabaikan, diwakilkan atau dilebur ke dalam ketiga budaya (dan bahasa) yang secara yuridis diakui dalam Anggaran dasar POT? Secara lebih jelas semboyan atau motto organisasi ini dirumuskan dalam ketiga bahasa (pasal 6 AD) yaitu dalam bahasa Meto (Dawan) “*nekaf mese ansaof mese tafena pah meto*” (**one heart, one soul, with pure conscience, built our region with determination**) dalam bahasa Tetun “*mai ita lian mesak neon mesak dale mesak hodi hadi’ak itakan rai*” (**one heart, one soul let us sit together to develop our country/region**) dalam bahasa Helong “*mai le, kit, nakbua, ko, no dale, le, kit nikit pait, buin baun mudin, deng panduli, in koma ka*” (**let us be of one mind and heart for the sake of our native land according to the expectations of our country**). Seperti diutarakan di atas semboyan dalam tiga bahasa lokal ini tidak dapat mewakili semua kelompok etnis lokal yang ada apalagi mewakili filosofi budaya dari semua kelompok yang mendiami pulau Timor baik karena keturunan, kawin mawin atau karena menghuni pulau ini secara turun temurun. Kemungkinan keterwakilan yang kuat adalah keterwakilan dalam satu entitas sosiologis dan politis untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik dan kesejahteraan pada umumnya dan bukan keterwakilan kultur atau budaya.

Walaupun keanggotaan organisasi ini mencakup semua kelompok etnis (asli) yang menghuni pulau Timor akan tetapi hal itu tidak berarti sudah mewakili semua kelompok etnisnya sebab budaya setiap etnis tidak dapat direduksi menjadi angka keterwakilan. Rumusan dalam pendahuluan yang berbunyi “...bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud maka segenap masyarakat Timor memandang perlu untuk membentuk suatu wadah yang bersifat kekeluargaan ...” lebih memperjelas nuansa politis organisasi ini. Keseluruhan latarbelakang, proses pendirian dan pernyataan seperti ini tampaknya lebih bernuansa politis daripada



bermakna budaya sebab untuk mendapat kesepakatan segenap masyarakat Timor bukanlah hal yang mudah kecuali sebuah retorika politik. Dugaan akan kecondongan politis ini semakin kuat bila dihubungkan dengan peristiwa pendiriannya sendiri sebab waktu pendirian POT berdekatan dengan pemilihan legislatif. Dalam Badan legislatif, menurut Undang-Undang ada lembaga baru yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili sejumlah Daerah di Indonesia dan pulau Timor sendiri mendapat kesempatan untuk menempatkan anggota DPD sehingga ada kepentingan politik yang kuat untuk menggalang konstituen dalam pemilu legislatif. Pada kenyataannya dalam pemilu legislatif terdapat salah satu anggota DPD yang mewakili pulau Timor yakni pendiri POT itu sendiri, dan kenyataan ini dapat menimbulkan tafsir politik yang berbau etnisitas ke arah sisi politis POT meskipun Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangganya tidak menyebutkan tujuan politik secara eksplisit.

Dengan terpilihnya ketua/pendiri POT sebagai anggota DPD yang mewakili pulau Timor dalam pemilu legislatif lalu akan muncul kesan seolah-olah POT merupakan basis politik non partai yang akan memperjuangkan kepentingan orang Timor dengan memperoleh dukungan masyarakat Timor secara meluas dalam pengertian semua orang dari etnis manapun yang mendiami pulau Timor. Analisis dan tafsir seperti ini tentu saja akan menimbulkan kontroversi dan bahkan menimbulkan sentiment politik yang berdampak luas, tetapi sebagai sebuah analisis dan tafsir dari sisi akademik hal ini perlu dilakukan agar dapat disimpulkan atau setidaknya diperoleh pemahaman apakah upaya membangun identitas (orang Timor) merupakan integrasi atau separasi baik di tingkat lokal (Timor, NTT), maupun di tingkat nasional. Jika tujuan, misi, keinginan dan keanggotaannya seperti yang tercantum dalam pendahuluan dan pasal 9 (pasal sembilan), pasal 14 (empat belas) Anggaran Rumahtangga POT, apa bedanya organisasi ini dengan organisasi lainnya yang sudah ada? Bukankah semuanya ingin memperjuangkan kepentingan ekonomi, sosial, budaya bahkan politik komunitas yang diberinya janji? Pengurus cabang partai politik, cabang kantor pemerintah, atau cabang lembaga bisnis sekalipun sering memberikan janji yang sama yaitu akan memperjuangkan kepentingan ekonomi-menyejahterakan masyarakat, memajukan pendidikan, menegakan keadilan, dan sebagainya.



Penutup

Kesimpulan

Meskipun kertas kerja ini tidak dapat menyajikan upaya pembangunan identitas orang Timor secara kronologis menurut urutan waktu secara menyeluruh, akan tetapi beberapa kasus yang ditawarkan dalam kertas kerja ini dapat memberikan gambaran umum bahwa perjuangan membangun identitas satu etnis bukanlah perjuangan yang mudah melainkan perjuangan yang penuh liku-liku dan tantangan. Liku-liku dan tantangan itu bermula dari kecurigaan dan berkurang atau tidak adanya dukungan masyarakat dan pemerintah bahkan dikarenakan oleh munculnya kecurigaan dari pihak lain seperti pihak keamanan yang mengkhawatirkan akan terjadinya gerakan separatisme sampai dengan keterbatasan biaya untuk memasyarakatkan gagasan dan menindaklanjutinya dengan kegiatan nyata. Dengan tujuan yang berbeda dan keterlibatan orang yang tidak sama, rupanya pengalaman panjang semenjak Timor *Verbond*, *Timor Elland Federatie*, UNTAS, Makasti, Dewan Raja Timor, Majelis Rakyat Timor sampai Persehatian Orang Timor membuktikan kesulitan dan tantangan dimaksud.

Organisasi, gerakan atau apa saja yang didirikan dengan dasar etnisitas, memperjuangkan kepentingan etnis dalam batas tertentu dapat mempersatukan warga etnisnya tetapi hal itu juga dapat berarti membangun garis demarkasi dengan etnis lain sehingga membuka peluang terjadi konflik bahkan disintegrasi sosial atau bahkan dicurigai akan membawa separatisme. Pengalaman beberapa organisasi dan gerakan yang mengatasnamakan Timor dalam kertas kerja ini memperlihatkan bahwa pembangunan atau gerakan yang berbasis etnis Timor tidak mampu berkembang, apalagi bertahan lama sehingga kesan dan kekhawatiran akan terjadi separatisme akan jauh kenyataan dibandingkan dengan kemungkinan terjadinya integrasi. Dalam masyarakat majemuk, pada satu sisi bukan tidak mungkin pembentukan organisasi berbasis etnis seperti dalam kertas kerja ini dapat menimbulkan disintegrasi-setidaknya disintegrasi sosial lokal di kemudian hari karena lahirnya demarkasi antar etnis dan oleh karena perlu dikelola secara sungguh dan berhati-hati. Pada sisi yang lain upaya sejenis yang sungguh bertujuan mengembangkan kebudayaan, kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat akan sangat membantu memperkuat daya rekat antar etnis dan oleh karena itu masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pencapaian hasil pembangunan dan memberikan “semangat dasar” (*basic spirit*), sebab pembangunan tanpa kebudayaan tidak lebih hanyalah ilusi. Perjuangan membangun kebudayaan adalah perjuangan membangun tanah air, tanah air merupakan jiwa dan semangat setiap orang dan setiap orang berhak membangun tanah airnya-



manusia tanpa tanah air sungguh akan sangat menyedihkan. Mungkin benar jeritan Nietzsche yang dikutip Sindunata (2003) “*Weh’ dem, der keine Heimat hat*”, betapa perih orang, yang tidak mempunyai tanah air.

Saran

Memperjuangkan dan membangun identitas budaya atau identitas etnis hendaknya dilakukan menurut filosofi dan budaya yang dimiliki oleh kelompok etnis itu sendiri dan karena kebudayaan tidak dapat diwakilkan atau diatasnamakan, demikian juga identitas etnis. Memperjuangkan identitas etnis hendaknya dilakukan dalam kerangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai sebuah entitas politik yang utuh, dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan sub entitas yang ada. Upaya ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak: pemerintah dan masyarakat sebab tanpa keterlibatan semua pihak upaya ini akan sia sia, sebab pada hakekatnya perjuangan ini merupakan hak setiap orang dan setiap kelompok.

Pemerintah termasuk pihak keamanan tidak perlu mencurigai setiap gerakan atau organisasi sekalipun memakai nama yang berbau etnis dan berkesan akan membawa konflik dan separasi sebab memperjuangkan hak politik merupakan salah satu sikap demokratis, tanda kemajuan peradaban dan dengan sendirinya menandakan kedewasaan berpolitik.

Referensi

Barth, F (ed)

1969 *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. George Allen & Unwin, London.

Bott, Elizabeth

1971 *Family and Social Network: Roles, Norms, and External Relationship in Ordinary Urban Families*. Tavistock, London.

Glazer, Nathan and Daniel P. Moynihan, (eds)

1975 *Ethnicity: Theory and Experience*. Harvard University Press, Cambridge.

Howell, Signe (ed)

1996 *For The Sake of Our Future: Sacrificing in Eastern Indonesia*. Research School CNWS, Leiden University, The Netherlands.



Jellinek, Lea

1976 *The Life of Jakarta Street Traders*. CSAS Monash University, Melbourne (Working Paper no.9).

Koli Bau, Y.

1996 *Ekonomi Politik Sub-Sonik: NTT Dalam Konfigurasi Ekonomi Politik Pembangunan*. Penerbit Nafiri, Yogyakarta.

1997 *Profil, Proses dan Jaringan Sosial Sektor Informal*. Penerbit Nafiri, Yogyakarta.

1999 *Negara, Etnisitas dan Sektor Informal: Kasus Kupang NTT*. (Disertasi S3-tidak dipublikasikan), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2003 *Sistem Politik Indonesia*. Penerbit Global Pustaka Utama, Yogyakarta.

Lee, Everett, S.

1992 *Teori Migrasi*. PPK UGM, Yogyakarta.

Manehat, Piet dan Gregor Neonbasu

1990 *Agenda Budaya Pulau Timor Vo 1 dan 2*. Komisi Komsos Provinsi SVD Timor-Nenuk, Atambua.

Manning, Chrys and Tadjuddin Nur Effendi (eds).

1991 *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Van den Berghe, Pierrel L.

1967 *Race and Racism: A Comparative Perspective*. John Wiley, New York.

DOKUMEN

Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga UNTAS

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga MAKASTI

Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga POT

Memori Serahterima Gubernur NTT 1978, 1988,1993

.

